

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana korupsi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang seharusnya berfungsi strategis melayani masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan, membutuhkan upaya luar biasa dalam pembuktianya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengkaji dan menganalisis pemberian insentif pegawai di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan; 2) Untuk mengkaji dan menjelaskan pengaturan pemberian insentif di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan yang berpotensi korupsi serta 3) pengelolaan keuangan dan solusi yang diperlukan untuk mengurangi potensi tindak pidana korupsi terhadap pemberian insentif pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara yang berjenis purposive sampling. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma yang mengatur pola pengelolaan keuangan dalam sistem remunerasi dan sub sistem insentif manajerial pegawai BLUD, bersumber dari Kementerian Kesehatan sebagai pembina teknis dan Kementerian Keuangan sebagai pembina keuangan. Kedua lembaga tersebut mengatur tertib hukum bagaimana operasional BLUD yang tidak mengutamakan keuntungan dalam roda bisnisnya, selaras dan sesuai dengan payung hukum Peraturan Bupati yang diberi kewenangan mengatur ketentuan norma BLUD, melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri. Potensi korupsi dalam pola pengelolaan keuangan berangkat dari adanya perubahan sistem pembayaran jasa pelayanan yang awalnya menggunakan sistem *fee for service* berubah menjadi sistem paket. Sehingga memicu tindakan untuk meninjau ulang sumber dana pos keuangan Peningkatan Pelayanan. Pengelolaan keuangan ke depan yang diperlukan untuk menutup celah korupsi adalah menegaskan ulang pada bidang perumusan yuridis peraturan perundangan yang mengatur pola keuangan BLUD, tertib dan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan (PUU) baik dari domain pembina teknis yaitu kementerian Kesehatan dan pembina keuangan yakni kementerian Keuangan. Selain itu dalam *legal substance* (formulasi yuridis) PUU BLUD RSUD perlu penyempurnaan berupa keselarasan aturan antara PerBup dengan Permendagri.

Kata Kunci :potensi, tindak pidana korupsi, insentif

ABSTRACT

This research is motivated by the presence of corruption in the Regional Public Service Agency (BLUD) which is supposed to function strategically in serving the community without prioritizing profits, requiring extraordinary efforts in its proof. The purpose of this study is to 1) study and analyze the provision of employee incentives in the Regional Public Service Board (BLUD) Kraton Regional Hospital of Pekalongan Regency; 2) To review and explain the provision of incentives in the Regional Public Service Board (BLUD) of Kraton Regional Hospital in Pekalongan Regency which has the potential for corruption and 3) financial management and solutions needed to reduce the potential for criminal acts of corruption against granting employee incentives to the Regional Public Service Board (BLUD)) Kraton Regional Hospital of Pekalongan Regency. The approach used is sociological juridical with descriptive qualitative research. Primary data collection techniques using interviews that have the type of purposive sampling. Secondary data obtained through library research. The results showed that the norms governing the pattern of financial management in the remuneration system and managerial incentive sub-system of BLUD employees were sourced from the Ministry of Health as technical advisors and the Ministry of Finance as financial coaches. The two institutions regulate the legal order of how BLUD operations that do not prioritize profits in the wheels of their business, are in harmony and in accordance with the legal umbrella Regulations of the Regent who are authorized to regulate the provisions of BLUD norms, through the Ministry of Home Affairs Regulation. The potential for corruption in financial management patterns departs from a change in the payment system for services that initially used a fee for service system changed to a package system. Triggering action to review the source of funds for financial services Improvement Services. Future financial management needed to close the gaps in corruption is reaffirming the field of legal formulation of laws and regulations governing the financial patterns of the BLUD, orderly and in accordance with all laws and regulations (PUU) both from the domain of the technical supervisors namely the Ministry of Health and the financial adviser ministry Finance. Besides that, in the legal substance (juridical formulation) PUU BLUD RSUD needs to be improved in the form of harmonization of rules between PerBup and Permendagri.

Keywords: *potential, corruption, incentives*